

REINTEGRASI DAN KONTRA-RADIKALISME: STUDI KASUS EFEKTIVITAS PROGRAM DERADIKALISASI BNPT DI LAPAS KHUSUS SENTUL

Reintegration and Counter-Radicalization: A Case Study of the BNPT Deradicalization Program at Sentul Special Correctional Facility

Edik Prayitno

Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Bung Karno

*Email: edik.prayitno@gmail.com

Abstract: *This study evaluates the National Counterterrorism Agency's deradicalization program at the Sentul Class IIB Special Correctional Facility in Bogor. A qualitative case-study design combines field observation, document analysis, and interviews with 35 informants: 20 former terrorist inmates, five BNPT instructors, five correctional officers, and five terrorism scholars. Program effectiveness is examined across short-, medium-, and long-term dimensions, including participation, behavioral and attitudinal change, social reintegration, and resistance to re-recruitment. The source reports that national-insight education, moderate religious dialogue, psychological counseling, and vocational training support cooperation and disengagement during and shortly after incarceration. Among the 20 former inmates interviewed, 14 were reported to have reintegrated peacefully and started independent livelihoods, while six experienced continuing social and economic difficulties. Long-term sustainability remains constrained by stigma, limited employment access, and pressure from former extremist networks. The study therefore proposes community-based aftercare involving government agencies, local facilitators, civil society, families, and receiving communities. The reported 85% program indicator cannot be independently audited because the source does not identify its denominator, documentary dataset, coding trail, ethics approval, or recidivism measurement period; it is consequently treated as a source-reported indicator rather than a verified population estimate.*

Keywords: Deradicalization; BNPT; Sentul Special Correctional Facility; Social reintegration; Post-release aftercare

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, Bogor. Desain studi kasus kualitatif memadukan observasi lapangan, analisis dokumen, dan wawancara terhadap 35 informan yang terdiri atas 20 mantan narapidana terorisme, lima instruktur BNPT, lima petugas masyarakat, dan lima akademisi studi terorisme. Efektivitas program dikaji pada dimensi jangka pendek, menengah, dan panjang, meliputi partisipasi, perubahan perilaku dan sikap, reintegrasi sosial, serta ketahanan terhadap perekrutan ulang. Sumber melaporkan bahwa pendidikan wawasan kebangsaan, dialog keagamaan moderat, konseling psikologis, dan pelatihan vokasional mendukung kerja sama serta pelepasan dari kekerasan selama dan sesudah masa pidana. Dari 20 mantan narapidana yang diwawancarai, 14 dilaporkan mampu berintegrasi secara damai dan merintis kehidupan mandiri, sedangkan enam masih menghadapi kesulitan sosial dan ekonomi. Keberlanjutan jangka panjang dibatasi stigma, akses kerja, dan tekanan jaringan ekstremis lama. Penelitian karena itu mengusulkan pendampingan berbasis komunitas yang melibatkan instansi pemerintah, fasilitator daerah, masyarakat sipil, keluarga, dan komunitas penerima. Indikator program sebesar 85% tidak dapat diaudit secara independen karena sumber tidak menjelaskan denominator, himpunan dokumen, jejak pengodean, persetujuan etik, atau periode pengukuran residivisme; angka tersebut diperlakukan sebagai indikator laporan sumber, bukan estimasi populasi terverifikasi.

Kata Kunci: Deradikalisasi; BNPT; Lapas Khusus Sentul; Reintegrasi sosial; Pendampingan pascapidana

1. Pendahuluan

Ancaman terorisme dan radikalisme berbasis kekerasan menuntut kebijakan yang memadukan penegakan hukum dengan pencegahan, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, kemudian kerangka penanggulangan terorisme diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Dalam kerangka tersebut, intervensi terhadap narapidana terorisme tidak berhenti pada pengamanan, tetapi juga mencakup pembinaan selama pidana dan persiapan kembali ke masyarakat.

Lapas Khusus Kelas IIB Sentul berada dalam ekosistem Pusat Deradikalisasi BNPT di Bogor. Nomenklatur Kelas IIB mengikuti dokumen resmi BNPT dan Direktorat Jenderal Masyarakat. Fasilitas ini digunakan untuk pembinaan narapidana terorisme yang dinilai kooperatif dan dapat mengikuti proses deradikalisasi, dengan pengelolaan yang melibatkan fungsi masyarakat, keamanan, dan substansi program deradikalisasi.

Program di dalam lembaga masyarakat dapat menghasilkan kepatuhan dan pelepasan dari tindakan kekerasan, tetapi perubahan perilaku tidak selalu identik dengan perubahan ideologi yang permanen. Setelah bebas, mantan narapidana menghadapi stigma, kesulitan ekonomi, hubungan keluarga yang berubah, dan kemungkinan kontak kembali dengan jaringan lama. Evaluasi efektivitas karena itu harus membedakan capaian jangka pendek, perubahan sikap jangka menengah, dan keberlanjutan reintegrasi jangka panjang.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan efektivitas program deradikalisasi BNPT di Lapas Khusus Sentul, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan penguatan kebijakan pascapidana. Pertanyaan utamanya ialah bagaimana kurikulum pembinaan dijalankan, perubahan apa yang dilaporkan oleh informan, dan kondisi apa yang menentukan keberlanjutan disengagement setelah kembali ke masyarakat.

2. Landasan Teoretis

2.1. Radikalisme, Disengagement, dan Deradikalisasi

Radikalisme dalam studi terorisme merujuk pada proses penerimaan gagasan yang dapat menolak legitimasi tatanan sosial-politik dan membenarkan pemaksaan atau kekerasan. Namun, gagasan radikal tidak selalu berakhir pada tindakan kekerasan; analisis perlu membedakan keyakinan, niat, keterlibatan organisasi, dan perilaku. Perbedaan tersebut penting agar intervensi tidak menyamakan perubahan perilaku dengan perubahan keyakinan secara otomatis (Borum, 2011).

Disengagement berfokus pada berkurangnya atau berhentinya keterlibatan perilaku dalam kelompok dan aksi kekerasan, walaupun sebagian keyakinan lama mungkin masih bertahan. Deradikalisasi menunjuk pada perubahan kognitif dan ideologis yang lebih luas, termasuk penolakan terhadap legitimasi kekerasan dan penerimaan kembali terhadap kehidupan sosial yang plural. Keduanya dapat beririsan, tetapi memiliki indikator dan lintasan yang berbeda (Bjørge & Horgan, 2009; Horgan, 2009).

2.2. Efektivitas Program

Kerangka Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (2012) digunakan untuk membaca efektivitas dalam rentang waktu. Efektivitas jangka pendek terlihat pada partisipasi, keterlibatan, dan kepatuhan terhadap tata tertib. Efektivitas jangka menengah mencakup perubahan pengetahuan, sikap, nilai, pelepasan baiat, penerimaan terhadap NKRI, serta penguasaan keterampilan. Efektivitas jangka panjang berhubungan dengan reintegrasi, kemandirian, ketahanan terhadap perekrutan ulang, dan ketiadaan keterlibatan kembali dalam kekerasan.

Ukuran jangka panjang memerlukan periode observasi dan sumber data yang memadai. Ikrar, kepatuhan, dan sertifikat pelatihan merupakan indikator proses atau capaian antara, bukan bukti tunggal perubahan ideologi permanen. Sebaliknya, residivisme perlu didefinisikan secara operasional, ditelusuri pada periode tertentu, dan dibedakan dari kesulitan sosial yang tidak berujung pada pelanggaran hukum.

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada Pusat Deradikalisasi BNPT dan Lapas Khusus Kelas IIB Sentul, Bogor. Lokasi dipilih secara purposif karena menjadi fasilitas khusus pembinaan narapidana terorisme. Pengumpulan data dilaporkan berlangsung pada November 2025-Juni 2026 melalui wawancara tatap muka, observasi berkala, dan telaah dokumen.

Tabel 1: Komposisi Informan dan Fokus Data

Kelompok	Jumlah	Fokus data
Mantan narapidana terorisme	20	Riwayat program, perubahan pandangan, keterampilan, dan adaptasi pascabebas.
Instruktur BNPT	5	Kurikulum pembinaan, asesmen perkembangan, dan tantangan operasional.
Petugas masyarakatan	5	Penilaian risiko, penelitian masyarakatan, dan aktivitas harian.
Akademisi studi terorisme	5	Penilaian program, perbandingan, dan dinamika jaringan radikal.

Sumber: diolah dari Tabel 1 naskah sumber; total 35 informan.

Dokumen yang disebut dalam sumber mencakup laporan akuntabilitas BNPT, hasil Penelitian Masyarakatan Direktorat Jenderal Masyarakatan, dan data statistik residivisme. Analisis mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014): kondensasi atau reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan verifikasi secara berulang.

Pelaporan sumber belum memuat pedoman wawancara, kriteria inklusi tiap kelompok, cara menghubungi mantan narapidana, jumlah penolakan, durasi wawancara, prosedur transkripsi, buku kode, pemeriksa kedua, persetujuan etik, mekanisme persetujuan partisipan, atau perlindungan data sensitif. Karena itu, kutipan dan angka hasil diperlakukan sebagai laporan naskah yang belum dapat direplikasi secara independen. Identitas informan tetap dianonimkan dan tidak diperluas dari informasi sumber.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Kurikulum Pembinaan

Sumber mengelompokkan pembinaan ke dalam empat dimensi. Pertama, re-edukasi wawasan kebangsaan membahas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mengoreksi penolakan terhadap negara. Kedua, reorientasi keagamaan menggunakan dialog dengan pemuka agama moderat untuk menelaah ulang pemaknaan jihad, khilafah, dan amar makruf nahi mungkar dalam koridor hukum serta kehidupan bersama.

Ketiga, konseling psikologis diarahkan pada pemulihan trauma, pengendalian emosi, dan penguatan ketahanan psikis terhadap keterikatan lama. Keempat, pelatihan kemandirian ekonomi mencakup keterampilan sablon digital, hidroponik,

pertukangan, dan pengelolaan usaha kecil. Keempat dimensi menunjukkan bahwa program tidak hanya menargetkan gagasan, tetapi juga kondisi psikologis, hubungan sosial, dan sumber penghidupan.

Tabel 2: Matriks Evaluasi Program Deradikalisasi

Dimensi	Kondisi awal	Capaian yang dilaporkan
Ideologi dan politik	Penolakan terhadap negara, hukum positif, dan simbol kebangsaan.	Ikrar setia NKRI, penghormatan simbol negara, dan penerimaan Pancasila.
Pemahaman agama	Penafsiran monolitik dan pembenaran kekerasan sebagai jalan jihad.	Penerimaan keragaman penafsiran, penolakan teror, dan keterbukaan dialog.
Kemandirian	Tidak memiliki sertifikasi kerja dan bergantung pada jaringan lama.	Sertifikasi keterampilan dan rencana usaha untuk masa pascabebas.
Interaksi sosial	Eksklusif dan membatasi komunikasi dengan petugas serta kelompok lain.	Relasi lebih kooperatif dengan petugas dan kesiapan membaur di masyarakat.

Sumber: diolah dari Tabel 2 naskah sumber; capaian merupakan laporan penelitian.

4.2. Efektivitas Jangka Pendek dan Menengah

Capaian jangka pendek dilaporkan melalui partisipasi dalam pembinaan dan relasi yang lebih kooperatif dengan petugas. Pada jangka menengah, sumber menempatkan Ikrar Setia NKRI dan pelepasan baiat sebagai indikator perubahan sikap. Salah satu informan anonim menggambarkan perubahan pandangan setelah mengikuti dialog keagamaan dan pendekatan kemanusiaan. Kesaksian tersebut mendukung arti penting hubungan persuasif, tetapi tidak dapat mewakili seluruh peserta tanpa triangulasi yang lebih rinci.

Matriks sumber melaporkan bahwa mayoritas sebesar 85% bersedia menyatakan ikrar, menghormati bendera, dan mengakui Pancasila. Denominator, periode pengukuran, dan hubungan angka tersebut dengan 20 mantan narapidana yang diwawancarai tidak dijelaskan. Angka 85% karena itu tidak diperlakukan sebagai tingkat keberhasilan populasi. Ia hanya menunjukkan indikator internal yang perlu dikonfirmasi melalui daftar peserta, waktu asesmen, dan pengukuran berulang.

4.3. Reintegrasi Sosial dan Kerentanan Pascapidana

Dari 20 mantan narapidana yang diwawancarai, sumber melaporkan 14 orang atau 70% dapat kembali hidup secara damai di daerah asal dan merintis usaha mandiri. Enam orang atau 30% menghadapi kesulitan penyesuaian sosial. Hasil tersebut memberi gambaran pengalaman sampel, tetapi tidak sama dengan angka residivisme karena sumber tidak menyatakan bahwa enam orang kembali melakukan tindak pidana.

Tiga hambatan utama muncul dalam wawancara: stigma masyarakat yang menimbulkan keterasingan; keterbatasan akses pekerjaan formal akibat rekam pidana; dan tekanan atau intimidasi dari jaringan ekstremis lama. Hambatan sosial-ekonomi dapat melemahkan dukungan terhadap disengagement, sedangkan ancaman perekrutan ulang menunjukkan perlunya pemantauan risiko yang proporsional dan tidak menstigmatisasi.

4.4. Pendampingan Lanjutan Berbasis Komunitas

Pembinaan tidak dapat dihentikan ketika masa pidana berakhir. Pendampingan lanjutan perlu menghubungkan BNPT, Balai Pemasarakatan, fasilitator daerah, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, keluarga, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Tujuannya ialah memastikan akses identitas, pekerjaan, dukungan psikososial, relasi keluarga, dan kanal bantuan ketika terjadi tekanan jaringan lama.

Sumber mengusulkan model terintegrasi hibrida yang menghubungkan intervensi di lapas dengan komunitas penerima. Kawasan Terpadu Nusantara dan organisasi mantan narapidana diposisikan sebagai ruang resosialisasi ekonomi serta sosial. Secara kebijakan, model tersebut memerlukan pembagian peran, mekanisme rujukan, perlindungan data, indikator keberhasilan, dan evaluasi jangka panjang agar tidak berhenti sebagai koordinasi informal.

4.5. Implikasi Evaluatif

Efektivitas program lebih tepat dibaca sebagai lintasan bertahap. Kepatuhan dan partisipasi menandai akses awal terhadap program; pelepasan dari kekerasan dan penerimaan dialog menunjukkan perubahan antara; sedangkan reintegrasi, kemandirian, serta ketiadaan perekrutan ulang membutuhkan pemantauan lintas tahun. Evaluasi sebaiknya menggabungkan asesmen risiko individual, data administratif, wawancara berulang, keterangan keluarga atau komunitas, dan indikator kesejahteraan tanpa mengabaikan hak partisipan.

5. Keterbatasan Penelitian

Studi ini terbatas pada satu lokasi dan pelaporan metode yang belum memadai untuk audit penuh. Komposisi 35 informan disebutkan, tetapi karakteristik, seleksi, saturasi, instrumen, dan jejak analisis tidak tersedia. Angka 85%, data 14 dari 20, dan rujukan pada residivisme tidak dilengkapi lampiran dokumen atau periode tindak lanjut. Publikasi hasil sensitif juga memerlukan penjelasan persetujuan etik, keamanan peneliti, persetujuan partisipan, dan mitigasi risiko identifikasi ulang.

6. Simpulan

Program deradikalisasi di Lapas Khusus Kelas IIB Sentul dilaporkan menggabungkan wawasan kebangsaan, dialog keagamaan moderat, konseling psikologis, dan keterampilan vokasional. Informasi dari 35 informan menunjukkan capaian pada partisipasi, kerja sama, pelepasan dari kekerasan, dan persiapan kemandirian. Dari 20 mantan narapidana yang diwawancarai, 14 dilaporkan berintegrasi secara damai dan enam masih menghadapi hambatan sosial-ekonomi.

Keberlanjutan jangka panjang tidak dapat ditopang oleh pembinaan di dalam lapas saja. Pendampingan berbasis komunitas, akses penghidupan, dukungan keluarga, dan perlindungan dari perekrutan ulang perlu menjadi satu rangkaian kebijakan. Namun, keterbatasan dokumentasi membuat tingkat efektivitas numerik belum dapat diverifikasi secara independen. Penelitian lanjutan harus menggunakan desain longitudinal, indikator residivisme yang jelas, audit data, dan protokol etik untuk penelitian populasi berisiko.

Daftar Pustaka

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2021. Rencana Strategis BNPT 2020-2024. Jakarta: BNPT.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. 2021. Standar Operasional Prosedur Pengamanan dan Pendampingan Program Deradikalisasi. Jakarta: BNPT.
- Bjørge, Tore, & John Horgan, eds. 2009. *Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement*. London: Routledge.
- Borum, Randy. 2011. Radicalization into Violent Extremism II: A Review of Conceptual Models and Empirical Research. *Journal of Strategic Security*, 4(4), 37-62.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2025. 16 Napiter Lapas Khusus Sentul Ikrar Setia NKRI, Ditjenpas Tegaskan Komitmen Deradikalisasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donnelly, & Robert Konopaske. 2012. *Organizations: Behavior, Structure, Processes*. 14th ed. New York: McGraw-Hill.
- Golose, Petrus Reinhard. 2020. *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Masalah*. Jakarta: YPKIK.
- Horgan, John. 2009. *Walking Away from Terrorism: Accounts of Disengagement from Radical and Extremist Movements*. London: Routledge.
- Hwang, Julie Chernov. 2018. *Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists*. Ithaca: Cornell University Press.
- Jones, Sidney. 2018. How Radicalization Happens in Indonesia. *Asian Affairs*, 49(1), 102-114.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, & Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage.
- Rabasa, Angel, Stacie L. Pettyjohn, Jeremy J. Ghez, & Christopher Boucek. 2010. *Deradicalizing Islamist Extremists*. Santa Monica: RAND Corporation.
- Schulze, Kirsten E. 2019. The Jakarta Attacks and the Evolution of the Islamic State Threat in Indonesia. *CTC Sentinel*, 12(6), 14-20.
- Sumpter, Cameron. 2017. Countering Violent Extremism in Indonesia: Priorities, Practice and the Role of Civil Society. *Journal for Deradicalization*, 11, 112-147.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

